



**DIKLAT PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI**

# **PENILAIAN ATAS PENCAPAIAN TUJUAN**

**Bogor, 5 Oktober 2022**

**IDEA**

Innovative - Delivered - Effective - Accountable

1

# *OVERVIEW*





# Konsepsi Pembaharuan Kebijakan Implementasi SPIP

## PENERAPAN



Implementasi SPIP harus dimulai dari **tujuan yang ingin dicapai**, bukan berangkat dari unsur/sub unsur SPIP

Tujuan

Struktur dan Proses Pengendalian

Evaluasi Efektivitas

Penerapan SPIP harus didahului dengan *assessment* atas **karakteristik organisasi, ketepatan penetapan tujuan, kesesuaian strategi dan indikator kinerja** yang ditetapkan



Penetapan Tujuan tepat?

Strategi sudah dipilih dengan sesuai?

Indikator ditetapkan dgn tepat?



Harus diidentifikasi secara **jelas/kongkret kaitan struktur/proses pengendalian** yang dibangun, dengan **aspek tujuan SPIP** yang disasar

## PENGUKURAN



Pengukuran bukan hanya bertujuan untuk memberikan skor, namun menitikberatkan pada perbaikan/penguatan pengendalian (***assess and assist***)



Pengukuran maturitas harus berorientasi pada pengujian atas **efektivitas** dari struktur dan proses pengendalian yang dibangun dalam mencapai *expected goals*, atau manfaat yang diharapkan



*Assessor/Evaluator* harus memiliki kompetensi untuk menentukan alat uji yang tepat dalam memperoleh keyakinan atas tercapainya efektivitas pengendalian.



Bukti pemenuhan level maturitas tidak berorientasi atau didominasi oleh bukti dokumen, terutama untuk pemenuhan level yang dianggap *mature*

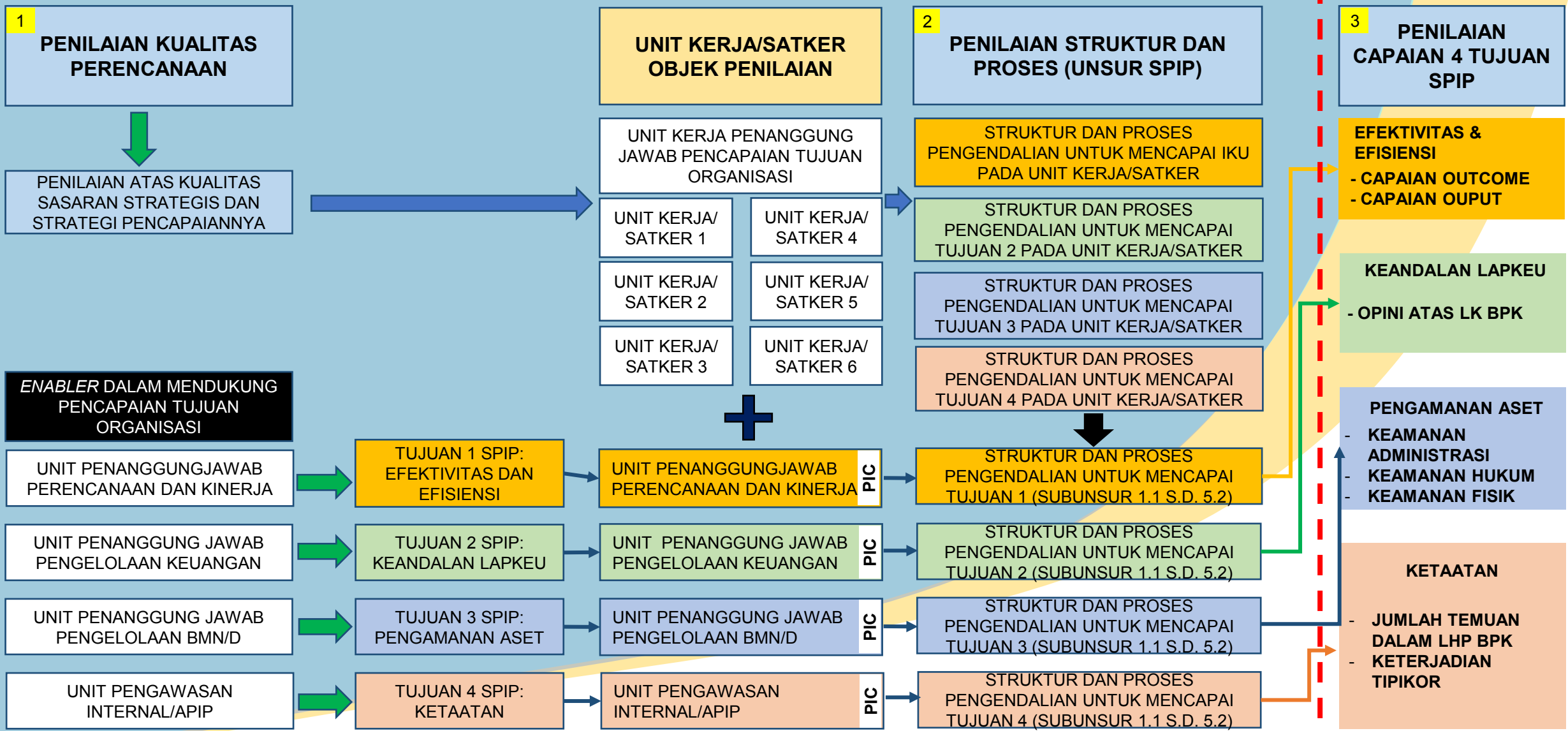
# FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP



**PENILAIAN  
PENCAPAIAN  
TUJUAN MEMILIKI  
BOBOT 30% DARI  
TOTAL PENILAIAN.**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40.00%</b>
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	100.00%	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30.00%</b>
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
<b>Penilaian Risiko</b>		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
<b>Pemantauan</b>		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	100.00%	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>		<b>30.00%</b>
<del>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</del>		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		
Opini LK	25%	
<b>Pengamanan atas Aset</b>		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
<b>Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan</b>		
Temuan Ketaatan	20%	
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	100.00%	
<b>TOTAL BOBOT</b>		<b>100.00%</b>

# ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (FOKUS 4 TUJUAN SPIP)

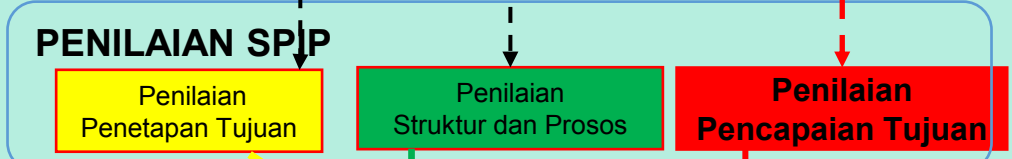




# PENGUKURAN MRI DALAM SUB KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN

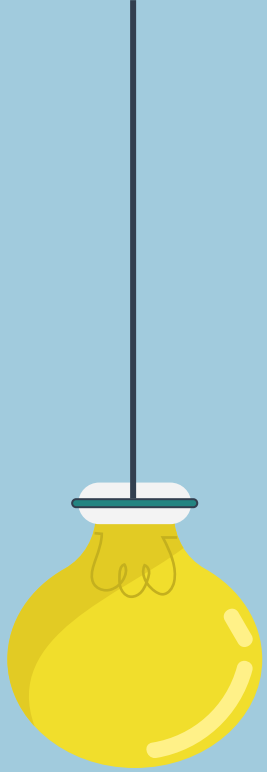
MAPPING PARAMETER PENGUKURAN MRI DALAM PENGUKURAN SPIP

PENILAIAN SPIP	AREA/KOMPONEN PENILAIAN MRI							
	PERENCANAAN	KAPABILITAS						HASIL
	KUALITAS PERENCANAAN	KEPEMIMPINAN	KEBIJAKAN MR	SUMBER DAYA MANUSIA	KEMITRAAN	PROSES MR	AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	OUTCOMES
1. PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN	2 Parameter							
2. PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES								
Subunsur 1.3		3 Parameter						
Subunsur 1.6				2 Parameter				
Subunsur 1.8					1 Parameter			
Subunsur 2.1			1 Parameter			2 Parameter	2 Parameter	
Subunsur 2.2						3 Parameter		
Subunsur 4.1		1 Parameter				2 Parameter		
Subunsur 5.1						3 Parameter		
3. PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN								1 Parameter
JUMLAH	2 Parameter	4 Parameter	1 Parameter	2 Parameter	1 Parameter	10 Parameter	2 Parameter	1 Parameter



AREA/KOMPONEN PENILAIAN MRI	SKOR	BOBOT	NILAI (SKOR X BOBOT)
<b>PERENCANAAN</b>		<b>40,00%</b>	<b>1,40</b>
KUALITAS PERENCANAAN	3,50	40,00%	1,40
<b>KAPABILITAS</b>		<b>30,00%</b>	<b>0,59</b>
KEPEMIMPINAN	1,89	5,00%	0,09
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	1,75	5,00%	0,09
SUMBER DAYA MANUSIA	2,00	5,00%	0,10
KEMITRAAN	3,00	2,50%	0,08
PROSES MANAJEMEN RISIKO	1,86	12,50%	0,23
<b>HASIL</b>		<b>30,00%</b>	<b>0,68</b>
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	1,82	18,75%	0,34
OUTCOMES	3	11,25%	0,34
			<b>2,67</b>

❖ SKOR Komponen = Nilai Rata2 Parameter Pada komponen

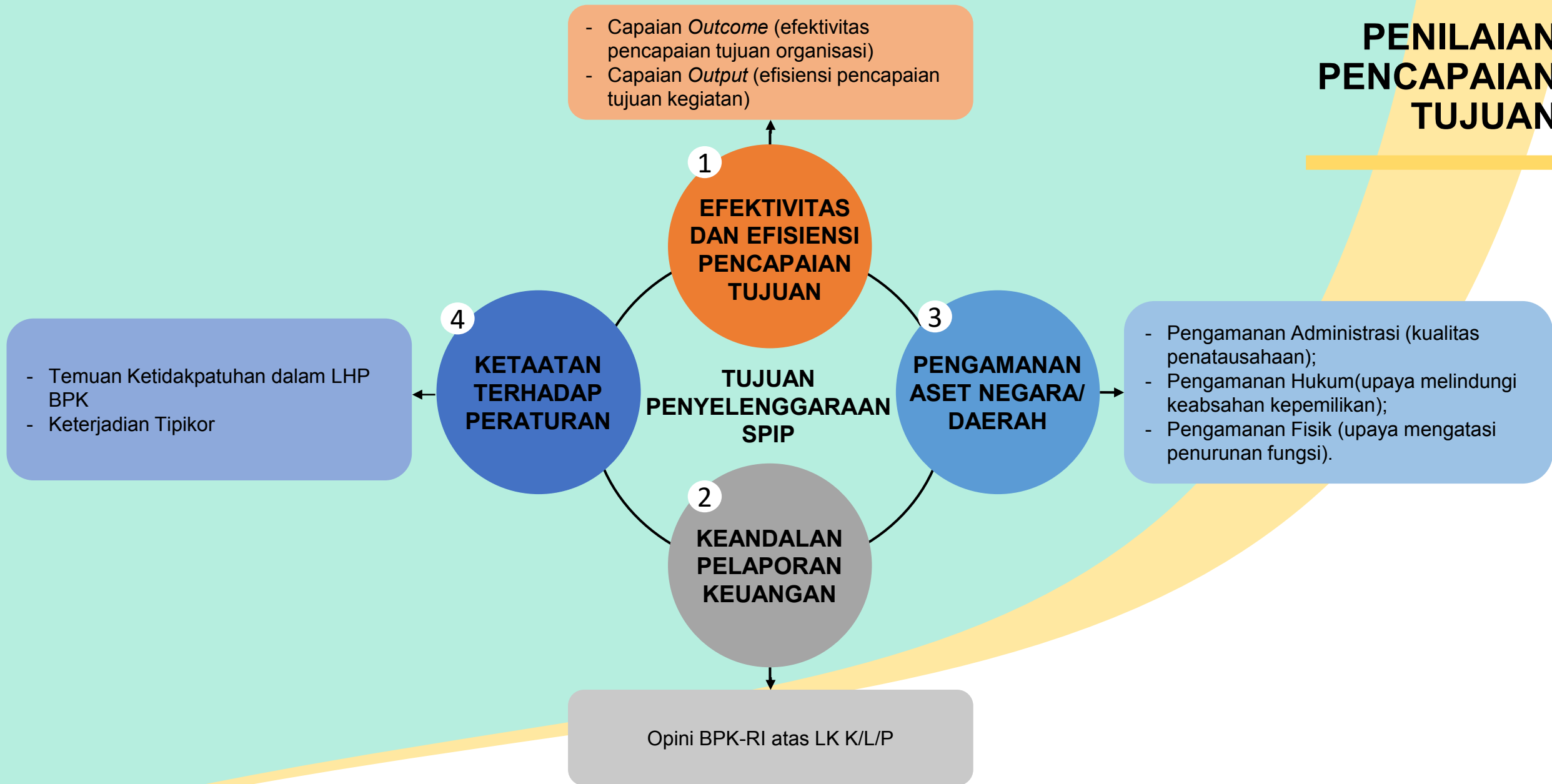


2

## Proses Penilaian Pencapaian 4 Tujuan SPIP



# PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN



# Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan

## Gambaran Umum

Efektivitas dan efisiensi dalam PP 8/2006 dan Perpres 29/2014;

Pemahaman atas keseluruhan siklus pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

## Skor

A : >90%

B :  $\geq 70\%$ -<90%

C :  $\geq 50\%$ -<70%

D :  $\geq 30\%$ -<50%

E : <30%

## Pengukuran

Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D;

Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja.



# Alur – Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja		Simpulan Penilaian
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapatkan Perkin Kepala K/L/D dan Laporan Kinerja K/L/D Tahun X-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hitung rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis K/L/D.</li> </ul>	Dilakukan oleh Asesor Instansi/Pemda (Penanggung Jawab Perencanaan )	Capaian <i>Outcome</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapatkan Perkin Kepala Satker dan Laporan Kinerja Satker Tahun X-1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hitung rata-rata pencapaian indikator <i>output</i> dari kegiatan satuan kerja</li> </ul>	Dilakukan oleh seluruh Asesor Satker	Capaian <i>Output</i>

# Alur Pengisian KK T1

**Pencapaian Tujuan  
Tahun X-1**

## KK 5.1 – Capaian *Outcome*

- Sasaran strategis
- Hasil penilaian kualitas sasaran strategis

scoring

**% realisasi capaian  
target *outcome***

## KK 5.2 – Capaian *Output*

- Sasaran strategis Satker
- Hasil penilaian kualitas sasaran strategis satker

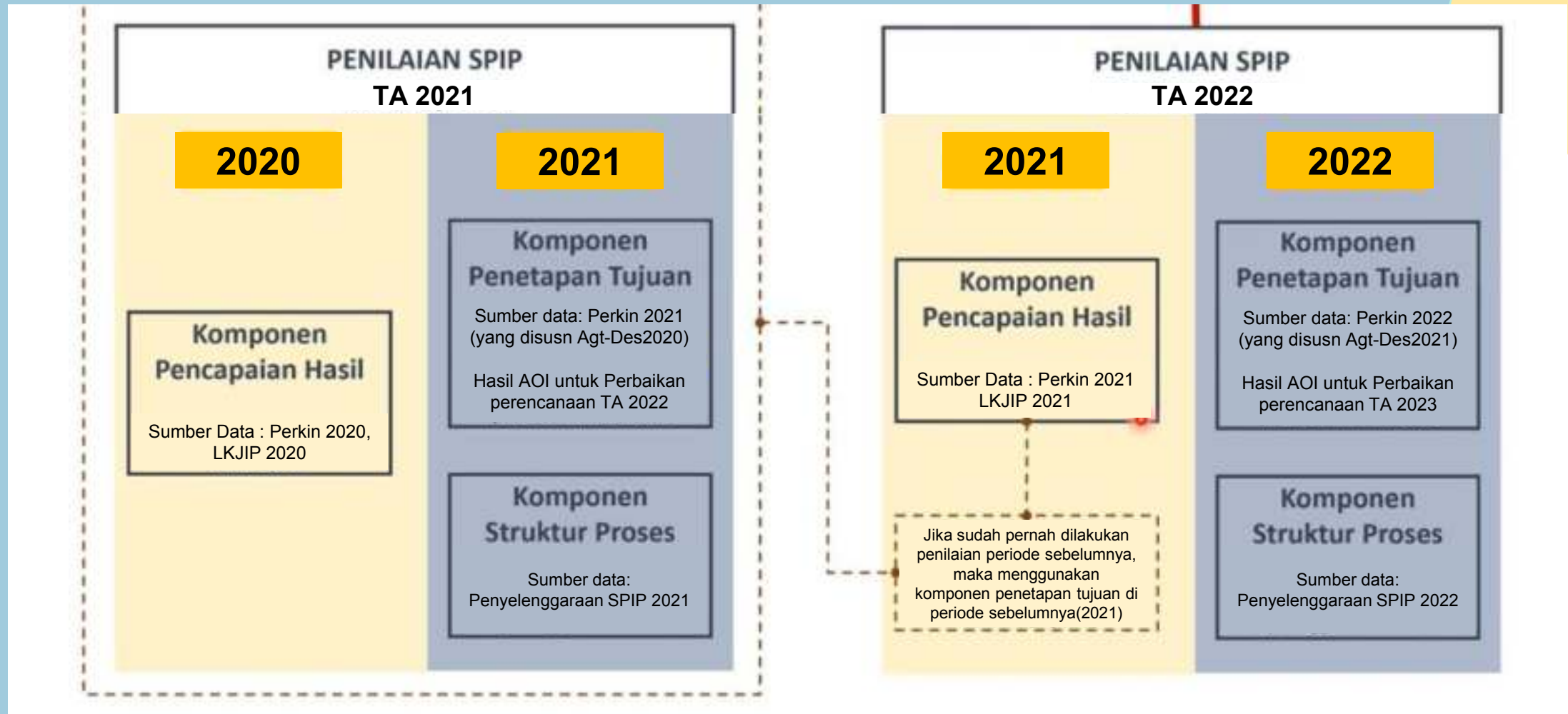
scoring

**% realisasi capaian  
target *output***





# Penilaian Mandiri sebagai siklus



# Contoh Pengisian KK T1

## KK 5.1 – Capaian *Outcome*

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA OUTCOME			CAPAIAN		
			SASARAN TEPAT	IK TEPAT	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
<b>KINERJA OUTCOME</b>								
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (%)	Y	Y	Y	5%	5%	100%
		Lama tinggal wisatawan (Length of Stay)		Y	Y	2.04 hari	2.1 hari	100%
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			
				Y/T	Y/T			

## KK 5.2 – Capaian *Output*

Jika terdapat jawaban "T", maka persentase realisasi bernilai "0"

NO	SASARAN STRATEGIS K/L/D	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	KRITERIA OUTCOME		NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RELEVAN MENCAPI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TEPAT	NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	KRITERIA OUTPUT			CAPAIAN				
			SASARAN TEPAT	IK TEPAT									RELEVAN MENCAPI SASARAN PROGRAM	IK TEPAT	DATA ANDAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI		
<b>KINERJA OUTCOME</b>																				
1	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (%)	Y	Y	1	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Y	Y	1	Kegiatan event pariwisata unggulan	Jumlah event pariwisata unggulan	Y	Y						
			Lama tinggal wisatawan (Length of Stay/LoS)	Y	Y	2	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Parekraf	Indeks kualitas atraksi parekraf		Y	2	Akreditasi usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata terakreditasi	Y	Y		4	4	100%	
				T					T					T	T		30	30	100%	
				T					T						T	T				0
				T					T						T	T				0

# Keandalan Pelaporan Keuangan

## Gambaran Umum

Opini LK dalam UU 15/2004, UU 15/2006, SAP dan SPKN;

Pemahaman atas keseluruhan siklus pengelolaan keuangan Negara/Daerah;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian sebelumnya?

## Skor

A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan berulang;

B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang;

C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang;

D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas;

E : *Disclaimer*/Tidak Wajar.

## Pengukuran

Mengidentifikasi informasi Opini Laporan Keuangan K/L/P dalam 5 tahun terakhir.



# Alur –Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja		Simpulan Penilaian
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>	Dapatkan Buku I dan Buku II (Buku SPI) LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.	Identifikasi informasi terkait Opini Laporan Keuangan K/L/D dalam 5 tahun terakhir.	Dilakukan oleh Asesor Instansi/Pemda (Penanggung Jawab Pengawasan dan Pengelola Keuangan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian subkomponen Keandalan Pelaporan Keuangan;</li><li>• Subunsur SPIP terkait.</li></ul>



# Kertas Kerja – Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...  
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP  
TUJUAN 2: KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN  
KK 6 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN**

**Indeks KK No. :**  
**Disusun oleh/Tanggal :**  
**Direviu oleh/Tanggal :**  
**Disetujui oleh/Tanggal :**

No	Parameter	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5
I	Opini	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer
		Penyebab Opini Tidak WTP: (dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)	Penyebab Opini Tidak WTP: (dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)	Penyebab Opini Tidak WTP: (dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)	Penyebab Opini Tidak WTP: (dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)	Penyebab Opini Tidak WTP: (dalam hal opini BPK-RI atas LK K/L/D bukan WTP, uraikan penyebabnya)
II	Temuan					
	a Ringkasan (uraikan secara ringkas substansi)					
	b Penyebab (uraikan secara ringkas penyebab)					

**Analisis:**

1. Analisis apakah terdapat temuan dengan penyebab yang berulang dalam 5 tahun terakhir.
2. Identifikasi sub unsur SPIP yang terkait dengan penyebab temuan berulang tersebut

**Simpulan:**

Berdasarkan hasil analisis dokumen ...  
Capaian komponen Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan adalah:

C

# Pengamanan Aset Negara

## Gambaran Umum

Mengapa pengamanan aset?;

Pengamanan Aset dalam PP 27/2014;

Pemahaman atas keseluruhan tahapan pengelolaan BMN pada PP 27/2014;

## Skor Pengamanan Administrasi

**A** : WTP min. 5x berturut, **tidak ada** catatan terkait aset;

**B** : WTP min. 3x berturut, **tidak ada** catatan terkait aset;

**C** : WTP min. 1x, **ada** catatan terkait aset;

**D** : WDP/terdapat catatan terkait aset;

**E** : **Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar dan/terdapat catatan** terkait aset.

## Skor Pengamanan Hukum

**A** : Selama **5th** tidak terdapat aset bermasalah hukum;

**B** : Selama **3th** tidak ada aset bermasalah hukum;

**C** : Selama **2th** tidak ada aset bermasalah hukum;

**D** : Terdapat aset bermasalah hukum namun **tidak mempengaruhi opini** BPK;

**E** : Terdapat aset bermasalah hukum yang **mempengaruhi opini** BPK.

## Skor Pengamanan Fisik

**A** : Selama **5 Tahun**, **100% BMN/D** berfungsi baik dan aman;

**B** : Selama **3 Tahun**, **100% BMN/D** berfungsi baik dan aman;

**C** : Selama **Satu Tahun terakhir**, **100% BMN/D** berfungsi baik dan aman;

**D** : **75-99% BMN/D** berfungsi baik dan aman;

**E** : **<75% BMN/D** berfungsi baik dan aman.

## Pengukuran

Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir.

# Alur – Penilaian Pengamanan atas Aset

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
<p><b>Pengamanan atas Aset</b></p>	<p>Dapatkan Buku I dan Buku II (Buku SPI) LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir, dan Laporan BMN dari pengelola Barang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir;</li> <li>• Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir;</li> <li>• Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir.</li> </ul>	<p>Dilakukan oleh Asesor Instansi/Pemda (Penanggung Jawab Pengawasan &amp; Pengelola Aset)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian pengamanan administratif BMN/D;</li> <li>• Subunsur SPIP terkait.</li> <li>• Capaian pengamanan hukum BMN/D;</li> <li>• Subunsur SPIP terkait.</li> <li>• Capaian pengamanan fisik BMN/D;</li> <li>• Subunsur SPIP terkait.</li> </ul>

# Kertas Kerja – Penilaian Pengamanan atas Aset

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...  
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP  
TUJUAN 3: PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH  
KK 7 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH**

Indeks KK No. :  
Disusun oleh/Tanggal :  
Direvisi oleh/Tanggal :  
Disetujui oleh/Tanggal :

Parameter	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	Analisis
I Keamanan Administrasi	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	WTP/WTP DPP/WDP/Tidak Wajar/Disclaimer	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Administrasi; 2. Identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab catatan tersebut.
	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	Penyebab Opini Tidak WTP: ...	
	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	Catatan terkait Aset (jika ada): ...	
II Keamanan Hukum	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	Catatan atau Temuan terkait Kepemilikan Aset: ...	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Hukum; 2. Identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab catatan/temuan tersebut.
III Keamanan Fisik	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik <i>(Jumlah BMND dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMND)</i>	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik <i>(Jumlah BMND dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMND)</i>	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik <i>(Jumlah BMND dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMND)</i>	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik <i>(Jumlah BMND dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMND)</i>	Persentase BMND dalam kondisi aman dan berfungsi baik <i>(Jumlah BMND dalam kondisi "baik" dibandingkan dengan jumlah total BMN dalam Laporan BMND)</i>	1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan Keamanan Fisik; 2. Identifikasi subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab kondisi yang tidak optimal tersebut.

**Simpulan:**

Berdasarkan hasil analisis dokumen ...  
Dari sisi keamanan administrasi ...  
Dari sisi pengamanan hukum ...  
Dari sisi pengamanan fisik ...  
Capaian komponen pencapaian tujuan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

- 1. Keamanan Administrasi C
- 2. Keamanan Hukum C
- 3. Keamanan Fisik D



# Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

## Gambaran Umum

Ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan kejadian korupsi di Sektor Publik di Indonesia;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian sebelumnya dan dengan subkomponen pencapaian tujuan lainnya?

## Skor

A : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  selama **4th** berturut dan **tidak mempengaruhi opini**;

B : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  selama **3th** berturut dan **tidak mempengaruhi opini**;

C : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  selama **2th** berturut dan **tidak mempengaruhi opini**;

D : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  dalam **TA terakhir** dan **tidak mempengaruhi opini**;

E : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $> 5$  dalam **TA terakhir**.

## Pengukuran

Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Per-UU-an;

Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon III untuk pusat dan pejabat eselon IV untuk daerah.



# Alur – Penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapatkan Buku III (Buku Kepatuhan) LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 4 tahun terakhir (ambil bagian resume)</li> <li>Dapatkan informasi terkait keterjadian korupsi di K/L/D.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon III untuk pusat dan pejabat eselon IV untuk daerah..</li> </ul>	<p>Dilakukan oleh Asesor Instansi/Pemda (Penanggung Jawab Pengawasan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian ketaatan dalam LHP BPK-RI;</li> <li>Subunsur SPIP terkait.</li> </ul> <p>Veto atas hasil penilaian subunsur terkait</p>

1

1. Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada Beberapa SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2.175.499.626,65;
2. Pembayaran Belanja Jasa Event Organizer pada Dua SKPD Tidak Sesuai Realisasi Sebesar Rp893.823.278,00;
3. Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pada Empat SKPD Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Sebesar Rp1.732.880.500,00;
4. Pembayaran Belanja Jasa Cleaning Service pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Realisasi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

BP 110017

BP 110017

Sebesar Rp1.064.987.667,62;

5. Pelaksanaan Belanja Perbaikan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp3.274.901.704,85;
6. Pelaksanaan Belanja Modal pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp5.855.838.778,84; dan
7. Pekerjaan Rehabilitasi Berkala Rana Jalan Lingkar Pulau Lembah Sekel I dan Sekel 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Tidak Dapat Dinyakini Kesesuaiannya dengan Spesifikasi.

Selanjutnya dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara agar memerintahkan:

2

13. Realisasi Belanja Pekerjaan Umum Luar Daerah Sebesar Rp220.000.000,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga TA 2016 Tidak Sesuai Ketentuan serta Dokumen Pertanggungjawabannya Tidak Lengkap dan Tidak Dapat Dinyakini Kebenarannya;
14. Pelaksanaan Beberapa Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Festival dan Belanja Pekerjaan Dinas Pendidikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan TA 2016 Tidak Sesuai Ketentuan; dan
15. Kekurangan Volume atau Pelaksanaan 23 Paket Belanja Modal pada Dinas SKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa TA 2016 Sebesar Rp1.068.495.845,93 Serta Denda Keterlambatan pada Dua SKPD Sebesar Rp41.115.842,24.

Selubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Minahasa antara lain agar:

1. Merekomendasikan Kepala Dinas Perdagangan untuk:
  - a. Mengajukan usulan tarif pasar yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk dimasukkan dalam kebijakan peraturan daerah;
  - b. Melakukan pembinaan kepada Kepala Pasar dan lembaga perantara pasar terkait penggunaan tarif yang dibelakakan;
  - c. Menawarkan dan menegahkan besaran tarif yang berlaku kepada para

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

3)

BP 110017

1

Sebagai bagian pemertan keuangan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Malang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemertan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kapabilitas terhadap kecurangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Malang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran atas realisasi tanggapan komunikasi internet, tanggapan resin, serta data operasional pimpinan DPRD Kota Malang sebesar Rp994.456.000,00
2. Kekurangan volume atau serbihnya paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang sebesar Rp1.136.230.487,67;
3. Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi pada lima SKPD sebesar Rp195.166.803,64.

Selubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Malang antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran tanggapan komunikasi internet, tanggapan resin, serta data operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp994.456.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah atau mengkompensasiannya ke pembayaran tanggapan komunikasi internet, tanggapan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

2

atas APBD Kota Malang 2017, LHP atas APBD Kota Malang 2018, LHP atas APBD Kota Malang 2014, LHP atas LHP

pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Malang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang sebesar Rp59.704.026,14.
2. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di lima Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Perangkat Kerja Daerah sebesar Rp333.232.667,44.

Selubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Malang antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp59.704.026,14; dan
2. memerintahkan Direktur RSUD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PSAPZKB, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas Perdagangan untuk memproses

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1/e

# Kertas Kerja – Penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...  
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP  
TUJUAN 4: KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KK 8 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indeks KK No. :  
Disusun oleh/Tanggal :  
Direviu oleh/Tanggal :  
Disetujui oleh/Tanggal :

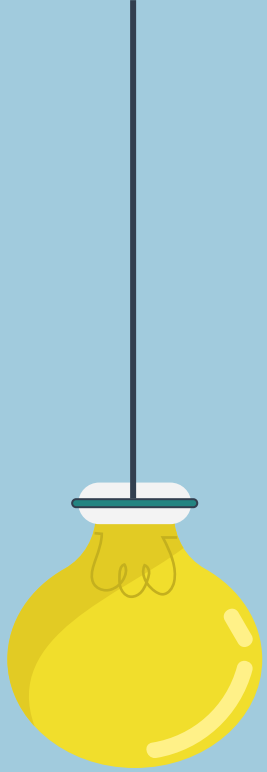
No	Parameter	T-1	T-2	T-3	T-4	Analisis
I	<b>Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK</b>					
	<b>a Ringkasan</b> <i>(uraikan secara ringkas substansi tiap butir temuan dalam Buku III LHP BPK-RI)</i>	...	...	...	...	<i>1. Analisis berdasarkan kriteria skor indikator pencapaian tujuan terkait Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK-RI; 2. Identifikasi subunsur Struktur dan Proses SPIP yang terkait dengan penyebab temuan tersebut.</i>
		...	...	...	...	
		...	...	...	...	
		...	...	...	...	
	<b>b Penyebab</b> <i>(uraikan secara ringkas penyebab tiap butir temuan dalam Buku III LHP BPK-RI)</i>	...	...	...	...	
		...	...	...	...	
		...	...	...	...	
		...	...	...	...	

II	<b>Keterjadian Tindak Pidana Korupsi</b>					
----	--	--	--	--	--	--

**Simpulan**

...  
Capaian komponen pencapaian tujuan Ketaatan terhadap Perundang-undangan adalah:

- 1 Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK D
- 2 Keterjadian Korupsi Ya

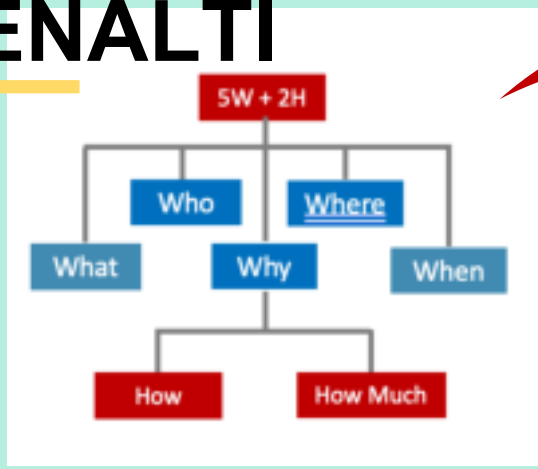


3

**PROSES PENALTY**

# PROSES PENALTI

Analisis Kasus Korupsi



Klasifikasi Kasus

## Informasi dari APH

- Kasus Korupsi Berjalan

## Laporan Auditor Eksternal

- BPK

## Laporan APIP

- Inspektorat dan BPKP

## Media Massa

- Isu yang berkembang di masyarakat (Informasi Tambahan/Penguat)

SUMBER INFORMASI



**Institusional**  
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi

**Individual**  
Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa melibatkan pihak lain, baik secara hierarki maupun lintas fungsi

● Terhadap seluruh pilar dari IEPK

● Terhadap sub unsur SPIP dan MRI terkait dengan kasus korupsi



# METODE PENALTI

Penalti dilaksanakan dengan menurunkan gradasi per parameter

## Institusional

SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.4
1.3	3.7
1.5	3.8
1.6	3.9
1.7	3.10
1.8	3.11
2.1	4.1
2.2	5.1
3.2	5.2

## Individual

SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.6
1.3	3.7
1.6	3.8
1.8	3.9
2.1	3.11
2.2	4.1
3.2	5.1
3.4	5.2

Penalti terhadap MRI bergantung pada sub unsur SPIP terkait

Penurunan dilakukan untuk Sub Unsur dengan capaian  $\geq 3$

Penurunan maksimal adalah sampai dengan kebijakan (Gradasi E) untuk SPIP

Penalti terhadap pilar-pilar IEPK menyesuaikan pada hasil analisis

Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur



# METODE PENALTI (KK LEAD II)

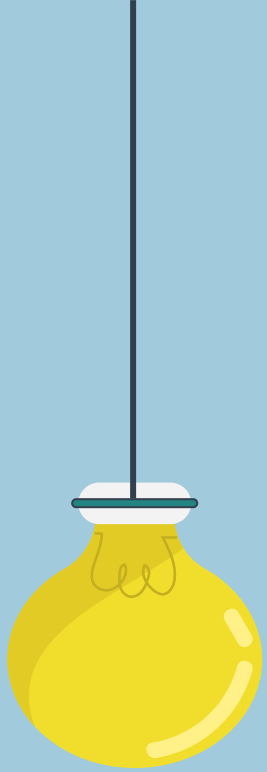
## KK 4 (VETO)

	STRUKTUR DAN PROSES	PENGURANGAN NILAI
I	Lingkungan Pengendalian	
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	YA
	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	TIDAK
	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	TIDAK
	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	TIDAK

## KK LEAD II



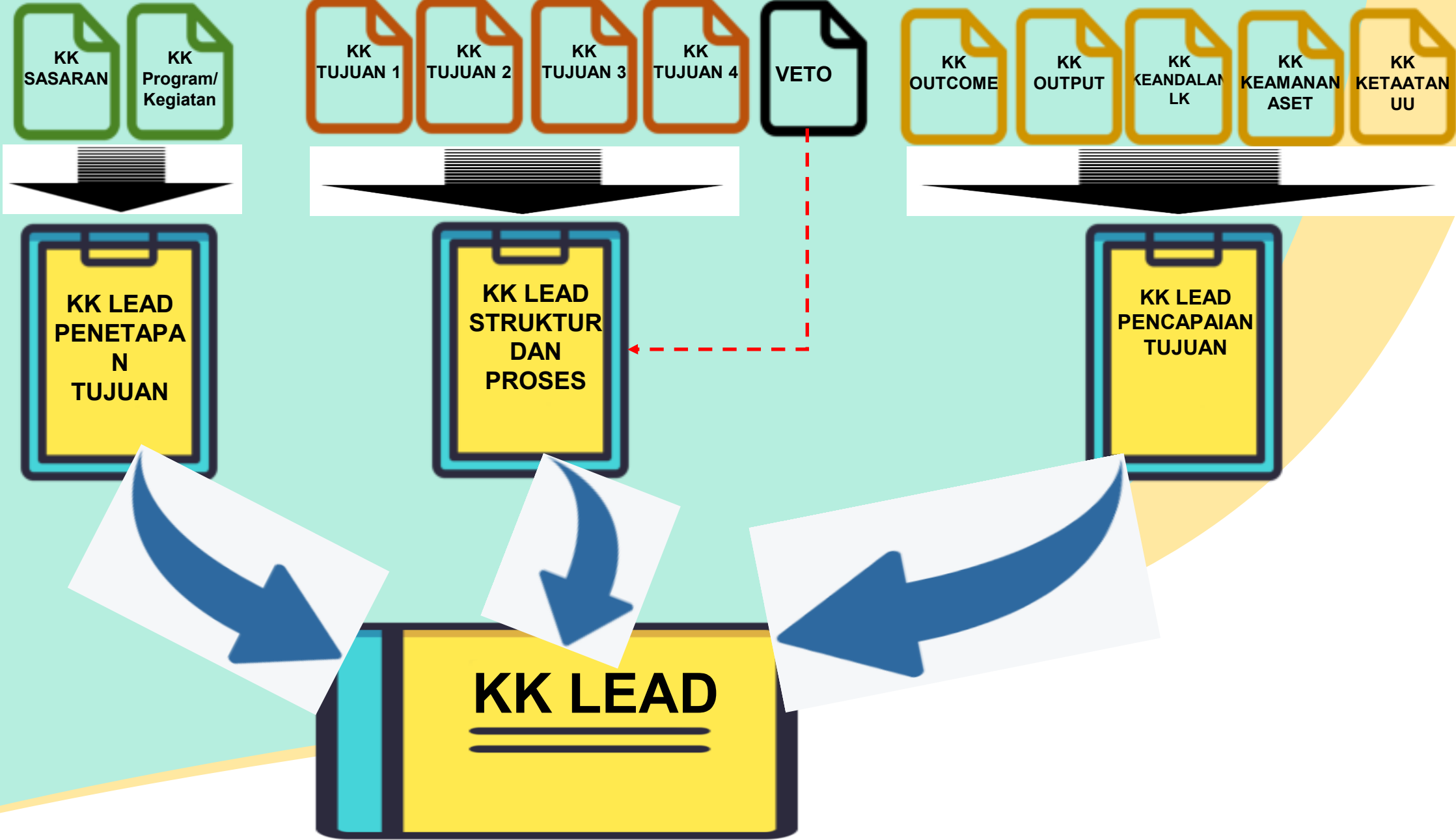
Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			2E NILAI	KEUANGAN NILAI	ASET NILAI	KETAATAN NILAI	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
				SPIP	MRI	IEPK							
1.1	<b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>						3	3	3	3	3	YA	2,00
1.1		1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPIP	-	-							
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan				3	3	3	3	3		2,00
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset										
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku										
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.1		5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.1		7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.1		8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK				3	3		2,00
1.2	<b>Komitmen terhadap Kompetensi</b>						3	3	3	3	3	TIDAK	3,00
1.2		1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	3	3	3	3	3		3,00



4

## Hubungan antar Kertas Kerja & Pelaporan

# STRUKTUR KERTAS KERJA



KERTAS KERJA PENYIMPULAN NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP						
Elemen, Unsur, dan Sub Unsur Result-Based SPIP	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	4	50,00%		2,00		
Kualitas Program dan Kegiatan	3	50,00%		1,50		
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>		100,00%		<b>3,50</b>		
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>			40,00%		<b>1,40</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Pengakuan integritas dan Nilai Etika (1.1)	1.500	3,75%		0,06		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3,75%		0,11		
Kepeemimpinan yang Konusif (1.3)	1.875	3,75%		0,07		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2.000	3,75%		0,08		
Penjujuran Peran APIC yang Efektif (1.7)	2.000	3,75%		0,08		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2.675	3,75%		0,11		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	1.750	10%		0,18		
Analisis Risiko (2.2)	1.817	10%		0,18		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Revisi atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	2,27%		0,07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.000	2,27%		0,05		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Revisi atas indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.000	2,27%		0,05		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.000	2,27%		0,05		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2.000	2,27%		0,05		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2.000	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.000	2,27%		0,05		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	1.950	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2.750	5%		0,14		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2.000	7,50%		0,15		
Evaluasi Temuan (5.2)	1.750	7,50%		0,13		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>			30,00%	<b>2,208</b>	<b>0,663</b>	
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>						

HASIL KK Lead Penetapan Tujuan

HASIL KK Lead Pencapaian Tujuan

HASIL KK Lead Struktur & Proses

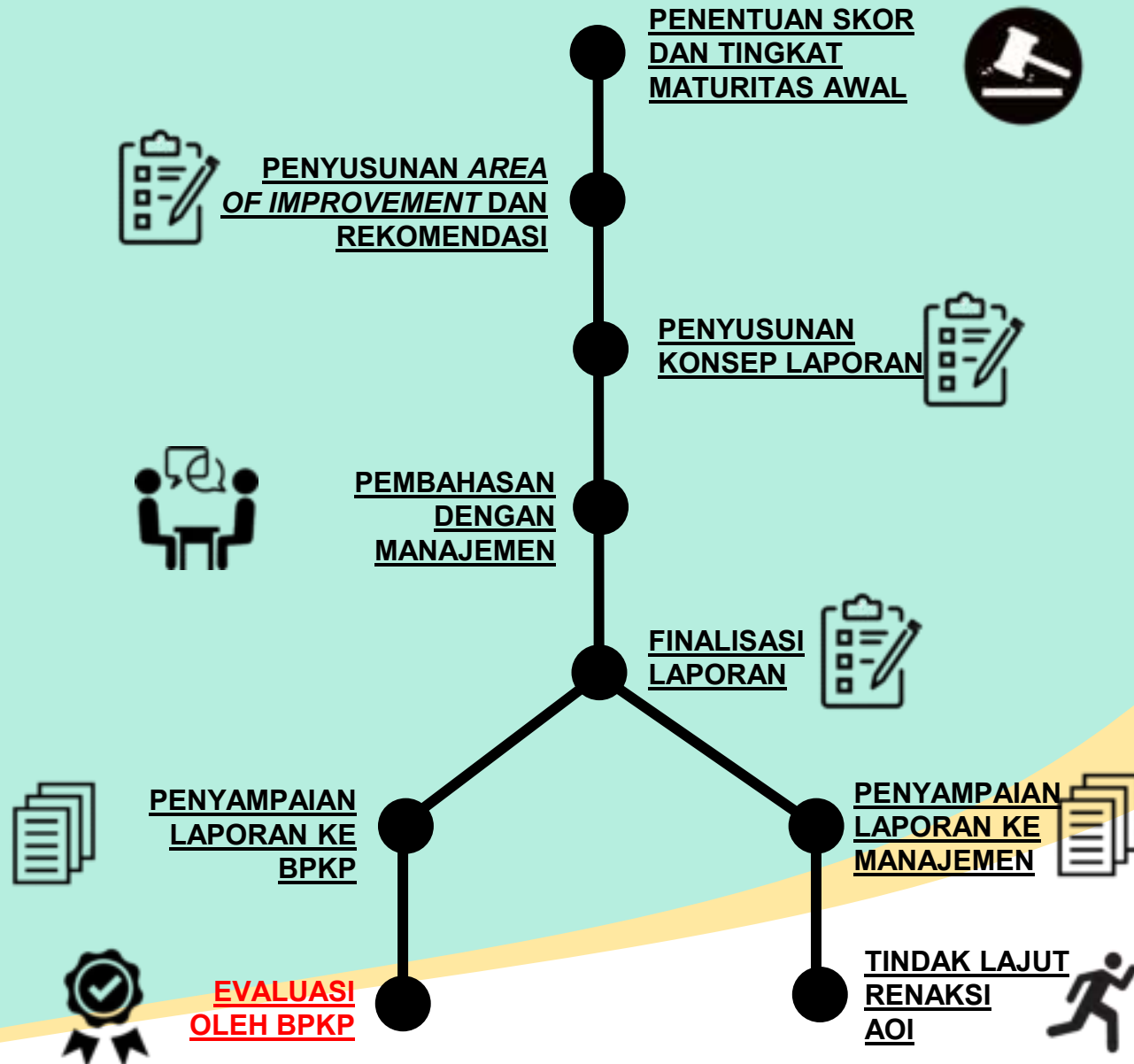
PENCAPAIAN TUJUAN			
<b>Efektifitas dan Efisiensi</b>			
Capaian Diktone	3	15%	0,45
Capaian Dufud	5	15%	0,75
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>			
Opri LK	3	25%	0,75
<b>Pengamanan atas Aset</b>			
Keamanan Administrasi	3	10%	0,30
Keamanan Fisik	3	5%	0,15
Keamanan Hukum	2	10%	0,20
Keamanan pada Peraturan Tertentu (Gedung, Parkir)	5	20%	1,00
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>		100,00%	<b>3,60</b>
<b>BOBOT HASIL</b>			<b>30,00%</b>
<b>NILAI MATURITAS RESULT-BASED SPIP</b>			
			<b>3,131</b>
<b>NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS</b>			
AREAKOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%	3,50	1,40
KUALITAS PERENCANAAN	80,00%	3,50	1,40
KAPABILITAS	30,00%	0,59	0,59
KEPEMIMPINAN	5,00%	1,09	0,09
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,75	0,09
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,00	0,10
KEMITRAAN	2,50%	3,00	0,08
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,06	0,23
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>	<b>1,02</b>	<b>0,68</b>
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,02	0,34
OUTCOMES	11,25%	1,02	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>2,67</b>
<b>NILAI INDEKS PENGENDALIAN KORUPSI</b>			
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%	0,80	0,80
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	1,50	0,11
LINGKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	1,88	0,14
POWER (KLUSA & WEWEWANG)	14,40%	1,88	0,27
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	1,50	0,14
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>38%</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,82	0,16
SALURAN LAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	1,95	0,07
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	1,88	0,17
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	1,50	0,11
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	1,50	0,11
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>18%</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
INVESTIGASI	8,00%	1,50	0,12
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	1,50	0,12
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>1,66</b>

NILAI SPIP

NILAI MRI

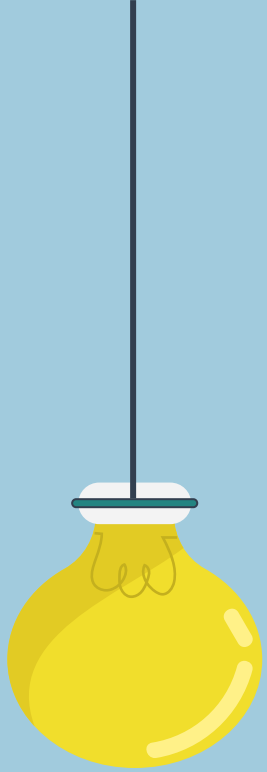
NILAI IEPK

# TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN



SLIDE BERIKUT





5

LATIHAN

# PRAKTIK SIMULASI PENGISIAN KERTAS KERJA

---



**LINK BAHAN:** [bit.ly/bahanlatihanH5](https://bit.ly/bahanlatihanH5)



**TERIMA KASIH**

